



Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan

BUKU SAKU PENGELOLAAN HIBAH

Per 30 Juni 2019

"Bersama Membangun Negeri"

RINGKASAN EKSEKUTIF

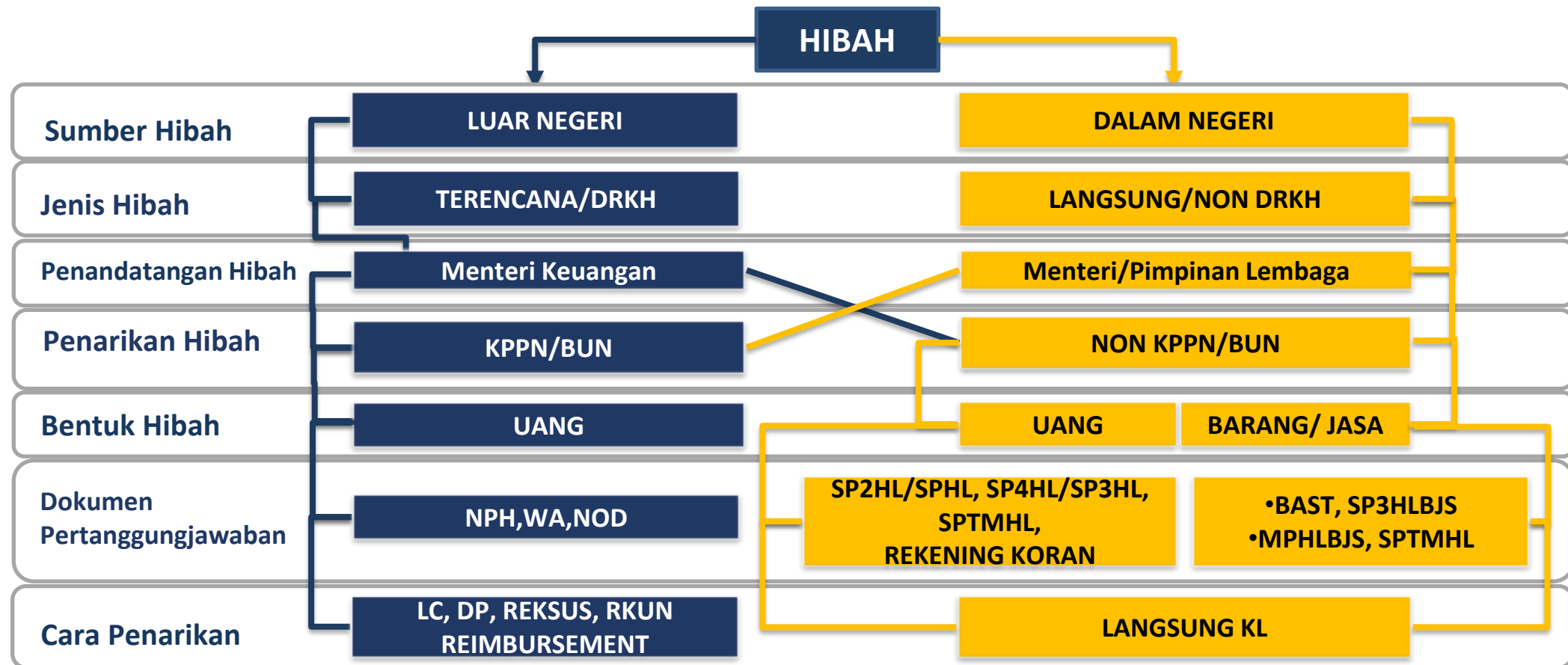
1. Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Tujuan penerimaan hibah adalah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
3. Materi pada publikasi ini mencakup data tentang realisasi penerimaan hibah Pemerintah Pusat belanja hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing, dan belanja hibah kepada Pemerintah Daerah.
4. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah Semester I Tahun 2018, realisasi penerimaan hibah Semester I Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 68,43%, yaitu sebesar Rp 1,56 triliun yang terdiri dari realisasi penerimaan hibah kas sebesar Rp 737,47 miliar dan penerimaan hibah barang/jasa sebesar Rp 821,55 miliar .

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
1. Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
9. Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan No 246/PMK.06/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing
12. Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
13. Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
15. Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
16. Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
17. Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
18. Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan BMN
19. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

CAKUPAN (1)

1. Cakupan realisasi penerimaan hibah yang disajikan dalam publikasi ini meliputi realisasi penerimaan hibah yang melalui kuasa BUN (terencana) dan tidak melalui kuasa BUN (langsung) dalam bentuk kas dan barang/jasa/surat berharga.



APBN

[Triliun Rupiah]

	LKPP				APBN
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.508,0	1.555,9	1.666,4	1.894,7	2.165,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.496,0	1.546,9	1.654,7	1.893,5	2.164,7
II. Hibah	12,0	9,0	11,6	1,2	0,4
B. Belanja Negara	1.806,5	1.864,3	2.007,4	2.220,7	2.461,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.183,3	1.154,0	1.265,4	1.454,5	1.634,3
1. Belanja Pegawai	281,1	305,0	312,7	342,5	381,6
2. Belanja Barang [#]	233,3	259,6	291,5	319,6	345,2
3. Belanja Modal [#]	215,4	169,5	208,7	193,7	189,3
4. Bunga Utang	156,0	182,8	216,6	249,4	275,9
5. Subsidi	186,0	174,2	166,4	228,1	224,3
6. Belanja Hibah	4,3	7,1	5,4	1,5	1,9
7. Belanja Bantuan Sosial [#]	97,2	49,6	55,3	80,3	102,1
8. Belanja Lain-Lain	10,1	6,0	8,8	38,6	114,0
II. Transfer Daerah	623,1	710,3	742,0	766,2	826,8
C. Keseimbangan Primer	(142,5)	(125,6)	(124,4)	(87,3)	(20,1)
D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)	(298,5)	(308,3)	(341,0)	(325,9)	(296,0)
Penerbitan SBN, Bruto / Penerbitan SBN, Bruto					
E. Pembiayaan	323,1	334,5	366,6	325,9	296,0
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan	24,6	26,2	25,6	0,0	0,0

Sumber:

*) LKPP (DJPN-Kemenkeu)

**) APBNP (DJA-Kemenkeu)

Catatan:

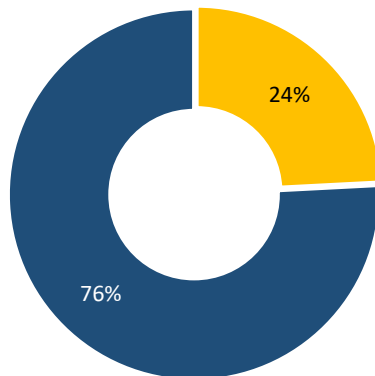
#) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian dibiayai dari Penerimaan Hibah

REALISASI PENERIMAAN HIBAH SEMESTER I TAHUN 2019

KETERANGAN		NILAI	KETERANGAN		NILAI	TOTAL
Hibah Dalam Negeri		806.670.334.504	Hibah Luar Negeri		752.350.422.567	1.559.020.757.071
-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	376.964.201.295	376.964.201.295
-	Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung):	806.670.334.504	-	Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung):	375.386.221.272	1.182.056.555.776
	Uang	348.216.680.532		Uang	12.289.615.931	360.506.296.463
	Barang	458.453.653.972		Barang	59.964.576.490	518.418.230.462
	Jasa	-		Jasa	303.132.028.851	303.132.028.851

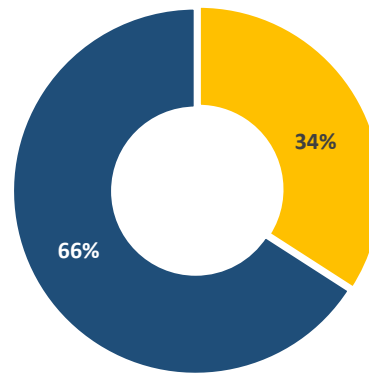
Sumber: Data LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019 berdasarkan SPAN, diolah

BERDASARKAN JENIS HIBAH



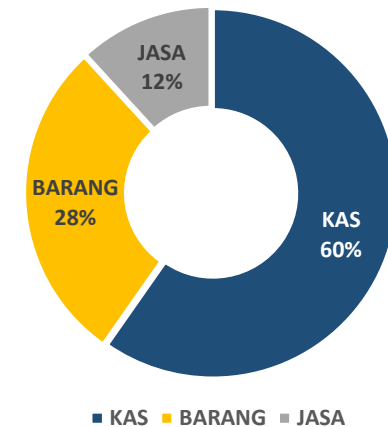
■ Melalui Kuasa Bun (Terencana) ■ Tidak Melalui Kuasa Bun (Terencana)

BERDASARKAN SUMBER



■ Hibah Dalam Negeri ■ Hibah Luar Negeri

BERDASARKAN BENTUK HIBAH

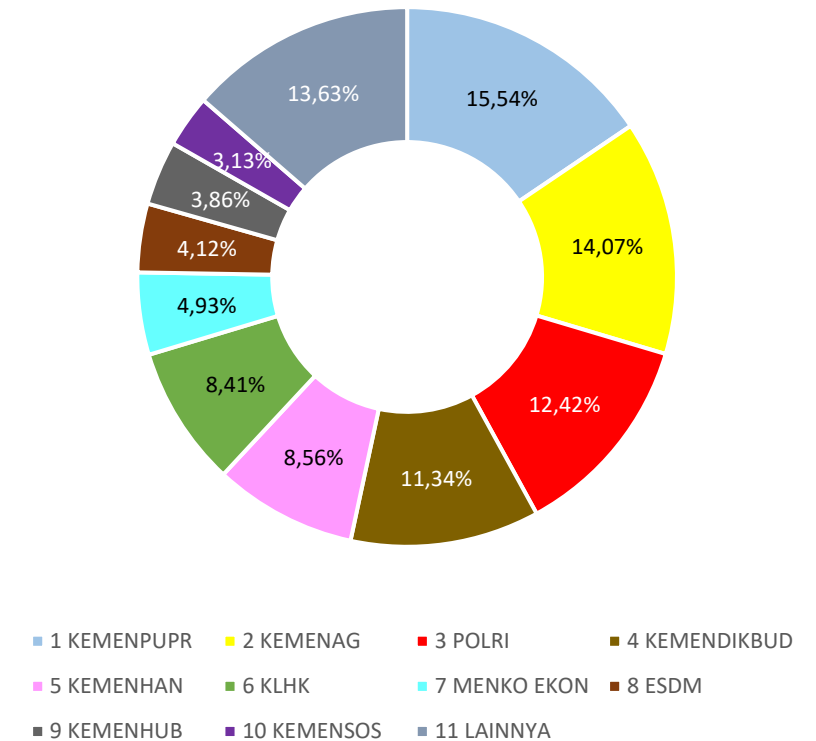


■ KAS ■ BARANG ■ JASA

REALISASI PENERIMAAN HIBAH SEMESTER I TA 2019 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	TERENCANA	LANGSUNG			TOTAL
		KAS	KAS	JASA	BARANG	
1	KEMENPUPR	232.934.561.230		9.322.973.829		242.257.535.059
2	KEMENAG		205.907.200.000		13.457.887.118	219.365.087.118
3	POLRI		57.444.148.386		136.207.211.985	193.651.360.371
4	KEMENDIKBUD			176.760.479.442		176.760.479.442
5	KEMENHAN		11.275.000.000		122.197.438.659	133.472.438.659
6	KLHK	118.762.699.437	7.315.002.931	1.927.822.951	3.158.236.155	131.163.761.474
7	MENKO EKON			76.836.389.526		76.836.389.526
8	ESDM			4.811.441.683	59.348.313.450	64.159.755.133
9	KEMENHUB				60.163.093.700	60.163.093.700
10	KEMENSOS		48.437.232.146		332.597.718	48.769.829.864
11	LAINNYA	25.266.940.628	30.127.613.000	33.472.921.420	123.553.551.677	212.421.026.725
TOTAL		376.964.201.295	360.506.196.463	303.132.028.851	518.418.330.462	1.559.020.757.071

REALISASI HIBAH BERDASARKAN K/L

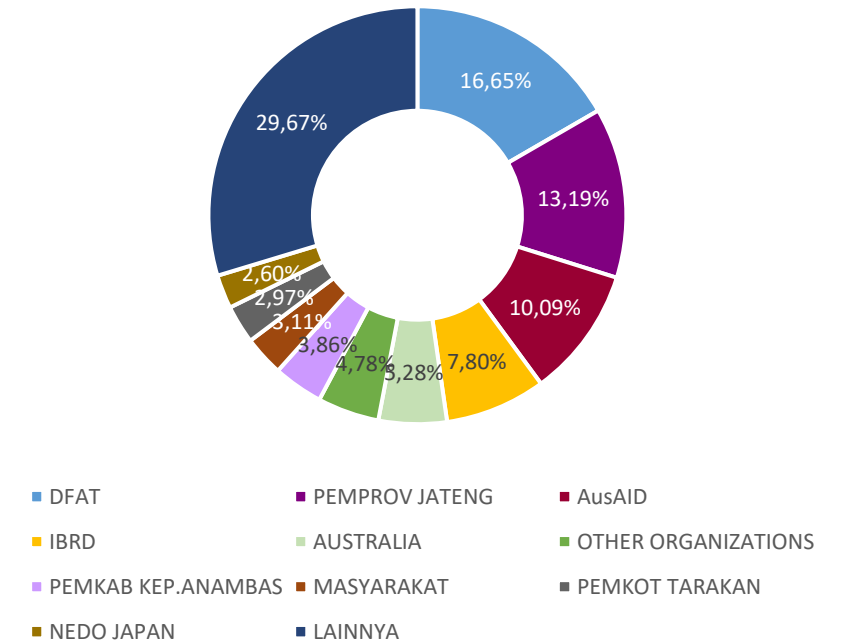


Sumber: Data LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019 berdasarkan SPAN, diolah

REALISASI PENERIMAAN HIBAH SEMESTER I TAHUN 2019 BERDASARKAN DONOR

NO	DONOR	KAS	JASA	BARANG	TOTAL
1	DFAT	73.425.187.339	186.083.453.271	-	259.508.640.610
2	PEMPROV JATENG	205.657.200.000	-	-	205.657.200.000
3	AusAID	157.284.007.284	-	-	157.284.007.284
4	IBRD	121.626.509.443	-	-	121.626.509.443
5	AUSTRALIA	-	82.282.894.329	-	82.282.894.329
6	OTHER ORGANIZATIONS	-	-	74.502.606.055	74.502.606.055
7	PEMKAB KEP.ANAMBAS	-	-	60.163.093.700	60.163.093.700
8	MASYARAKAT	48.437.232.146	-	-	48.437.232.146
9	PEMKOT TARAKAN	-	-	46.325.029.760	46.325.029.760
10	NEDO JAPAN	-	-	40.602.919.338	40.602.919.338
11	LAINNYA	131.040.261.546	34.765.681.251	296.824.681.609	462.630.624.406
TOTAL		737.470.397.758	303.132.028.851	518.418.330.462	1.559.020.757.071

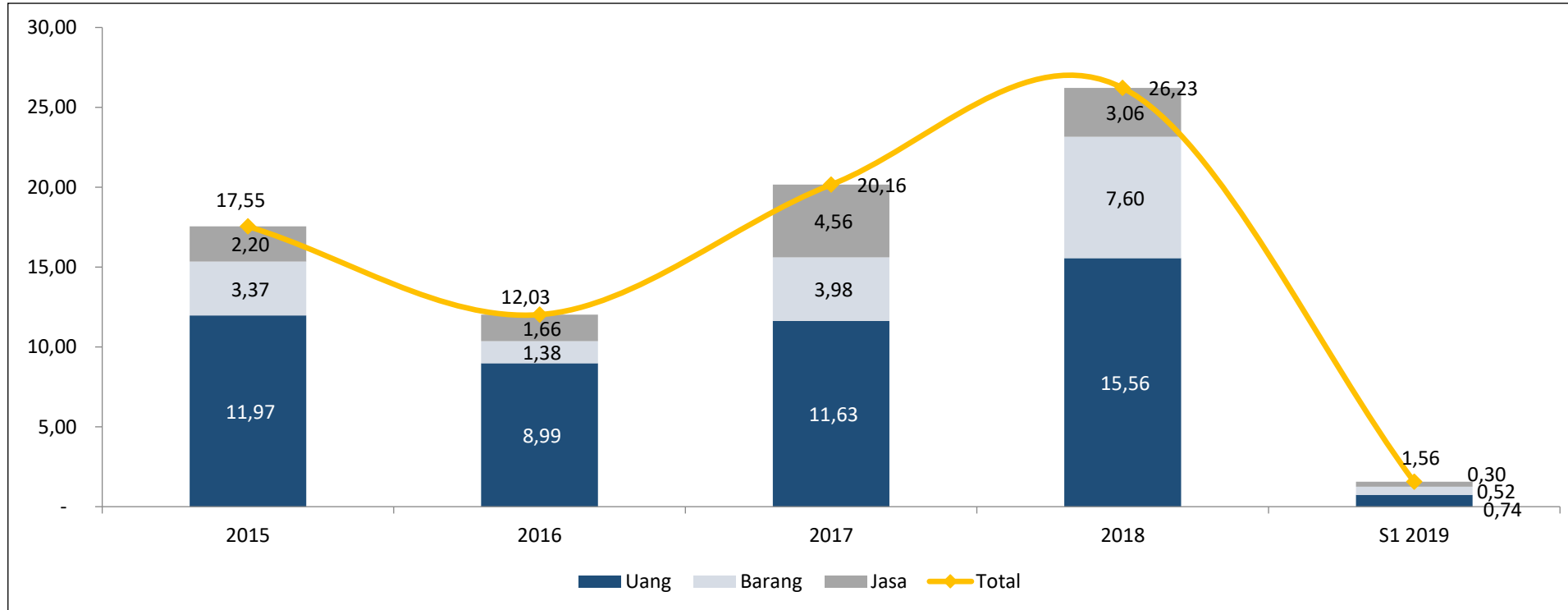
REALISASI HIBAH BERDASARKAN DONOR



Sumber: Data LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019 berdasarkan SPAN, diolah

PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN BENTUKNYA

(triliun rupiah)

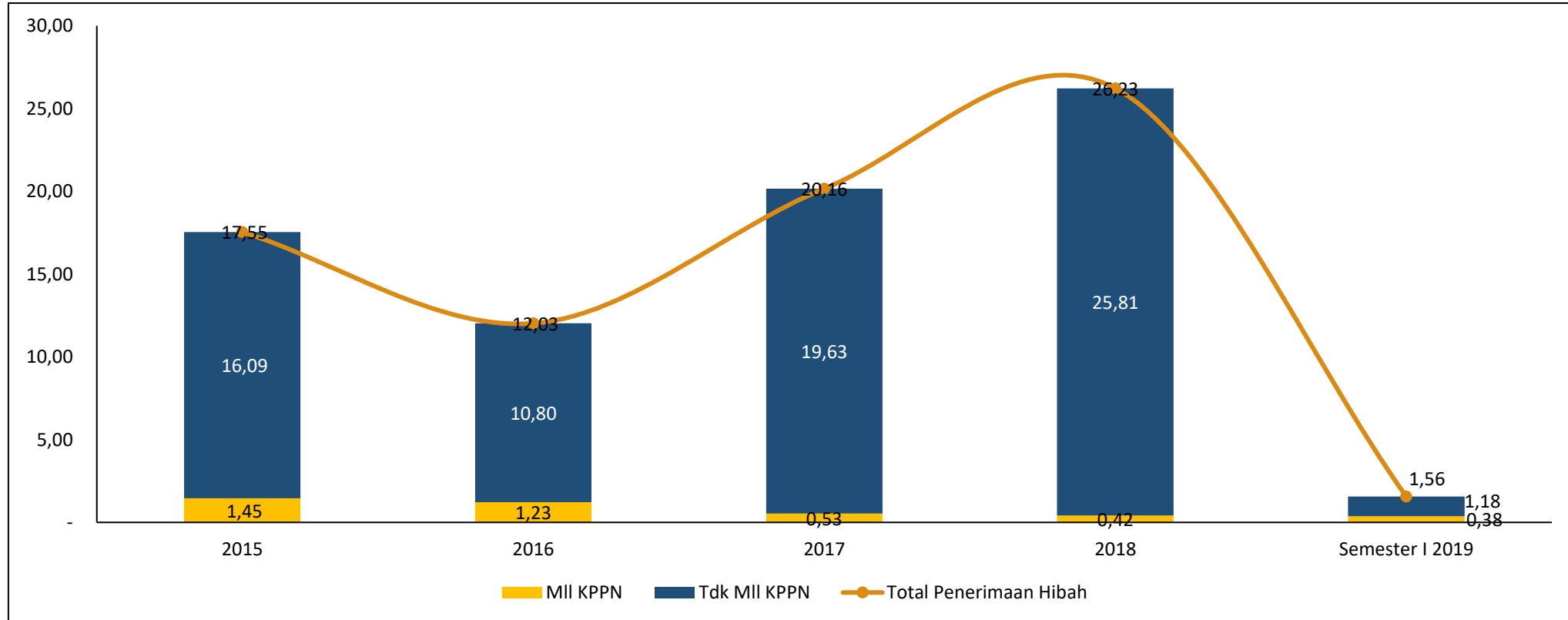


JENIS HIBAH	2015	2016	2017	2018	S1 2019
Uang	11,97	8,99	11,63	15,56	0,74
Barang	3,37	1,38	3,98	7,60	0,52
Jasa	2,20	1,66	4,56	3,06	0,30
Total	17,55	12,03	20,16	26,23	1,56

Sumber: Data LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019 berdasarkan SPAN, diolah

PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN MEKANISME PENCAIRAN

(triliun rupiah)

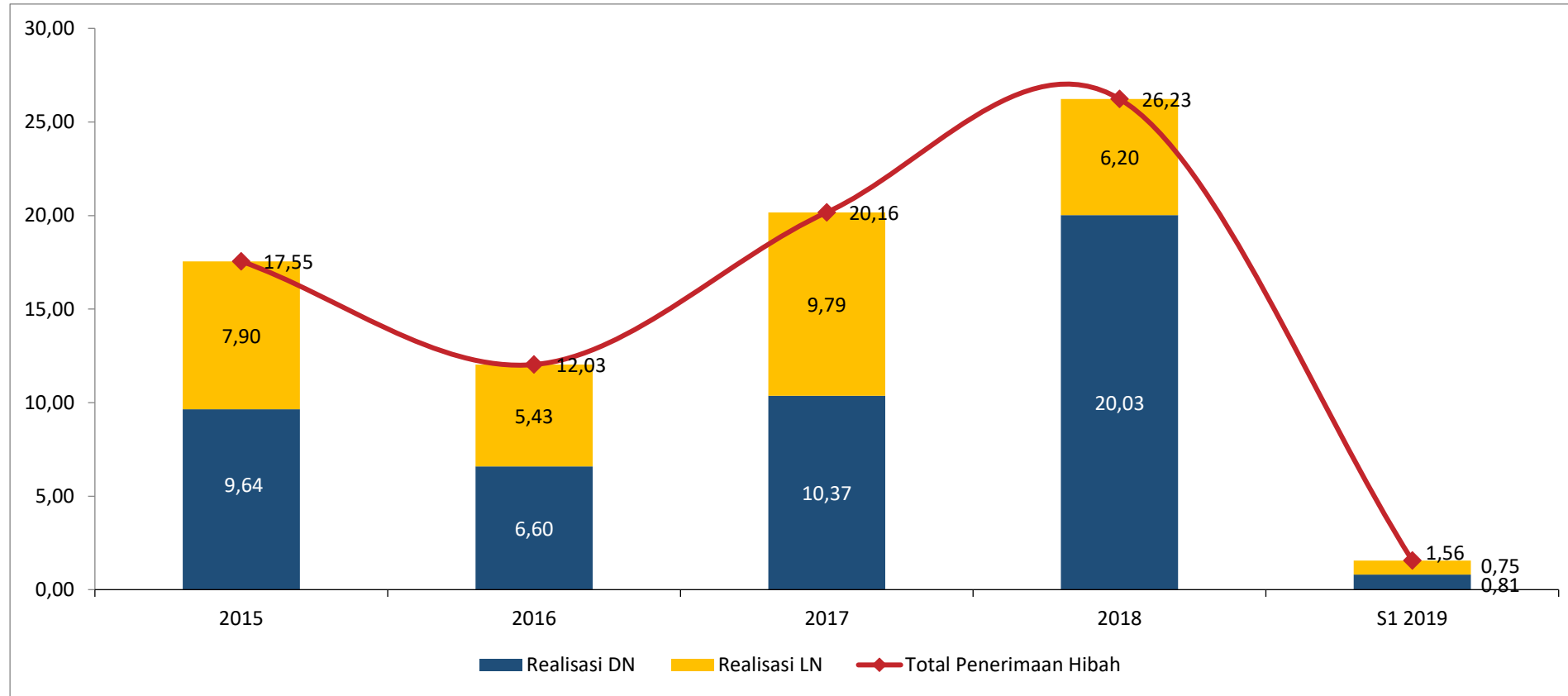


Tahun	2015	2016	2017	2018	S1 2019
Melalui KPPN	1,45	1,23	0,53	0,42	0,38
Tidak Melalui KPPN	16,09	10,80	19,63	25,81	1,18
Jumlah	17,55	12,03	20,16	26,23	1,56

Sumber: Data LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019 berdasarkan SPAN, diolah

PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN SUMBER HIBAH

(triliun rupiah)



Sumber Hibah	2015	2016	2017	2018	S1 2019
Realisasi DN	9,64	6,60	10,37	20,03	0,81
Realisasi LN	7,90	5,43	9,79	6,20	0,75
Total Penerimaan Hibah	17,55	12,03	20,16	26,23	1,56

Sumber: Data LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019 berdasarkan SPAN, diolah

REALISASI BELANJA HIBAH SEMESTER I TAHUN 2019

NO	JENIS HIBAH	PAGU	REALISASI
Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri		14.122.887.000	0
1	Bantuan Kemanusiaan	14.122.887.000	-
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait		440.000.000	49.191.769
2	Banking Commission	440.000.000	49.191.769
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah		4.287.654.415.000	4.759.118.363
3	Pembangunan MRT	2.273.945.000.000	
4	Air Minum	100.000.000	
5	Air Limbah	100.000.000	
6	sAIG	100.000.000	
7	FMSRB	118.567.548.000	2.757.746.700
8	Leuser	19.700.000.000	
9	PRIM	48.300.000.000	
10	IPAL Palembang	24.000.000.000	
11	READ-SI	50.725.000.000	
12	IPDMIP ADB	177.275.821.000	1.667.743.006
13	IPDMIP AIF	33.052.047.000	333.628.657
14	IPDMIP IFAD	41.788.999.000	
15	Hibah Jalan Daerah	500.000.000.000	
16	Hibah Air Minum Rupiah Murni	900.000.000.000	
17	Hibah Sanitasi/Air Limbah Rupiah Murni	100.000.000.000	
TOTAL		4.302.217.302.000	4.808.310.132

Sumber: LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH SEMESTER I TAHUN 2019 (1)

A. Sumber dari Pinjaman yang Diterushibahkan

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	TAHUN PELAKSANAAN
1	Pembangunan MRT	Mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang telah menjadi prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	2009 – 2025
2	Air Minum	Sebagai dana pengganti untuk pelaksanaa kegiatan percontohan pembangunan sambungan air miunum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based)	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	2012 – 2020
3	Air Limbah	Sebagai dana pengganti atas pelaksanan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat	Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2012 – 2020

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH SEMESTER I TAHUN 2019 (2)

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	TAHUN PELAKSANAAN
4	Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi/ Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIIG)	Mempercepat pencapaian pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pedoman pengelolaan program hibah.	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	2013 – 2020
5	Hibah Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	Meningkatkan kesiapan mengelola dan mengurangi risiko (mitigasi) banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai dan mengubah paradigma dari kegiatan yang berorientasi proyek pengendalian banjir yang meliputi cara-cara struktural menjadi proses pengelolaan banjir terintegrasi yang menyediakan satu perpaduan yang sesuai antara intervensi non-struktural, peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta kegiatan konstruksi untuk mitigasi dampak negatif banjir.	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2018 – 2022
6	Hibah Palembang City Sewerage Project/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang	Mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan di Kota Palembang	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	2018 – 2021

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH SEMESTER I TAHUN 2019 (3)

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	TAHUN PELAKSANAAN
7	Biodiversity Conservation And Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem (Leuser)	Memberikan dukungan atas keberlangsungan konservasi alam pada ekosistem di area Gunung Leuser yang meliputi konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian iklim sehingga dapat memberikan dampak terhadap keseimbangan keanekaragaman hayati dan emisi karbondioksida (CO2) di Indonesia	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016 – 2018
8	Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan memberikan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan	Ditjen Bina Marga, KemenPUPR	2013 – 2021
9	Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative (READ-SI)	Pengembangan pertanian dan penghidupan di perdesaan	Kementerian Pertanian	2019 – 2023
10	Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan	Dirjen SDA, KemenPUPR	2018 – 2022

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH SEMESTER I TAHUN 2019 (4)

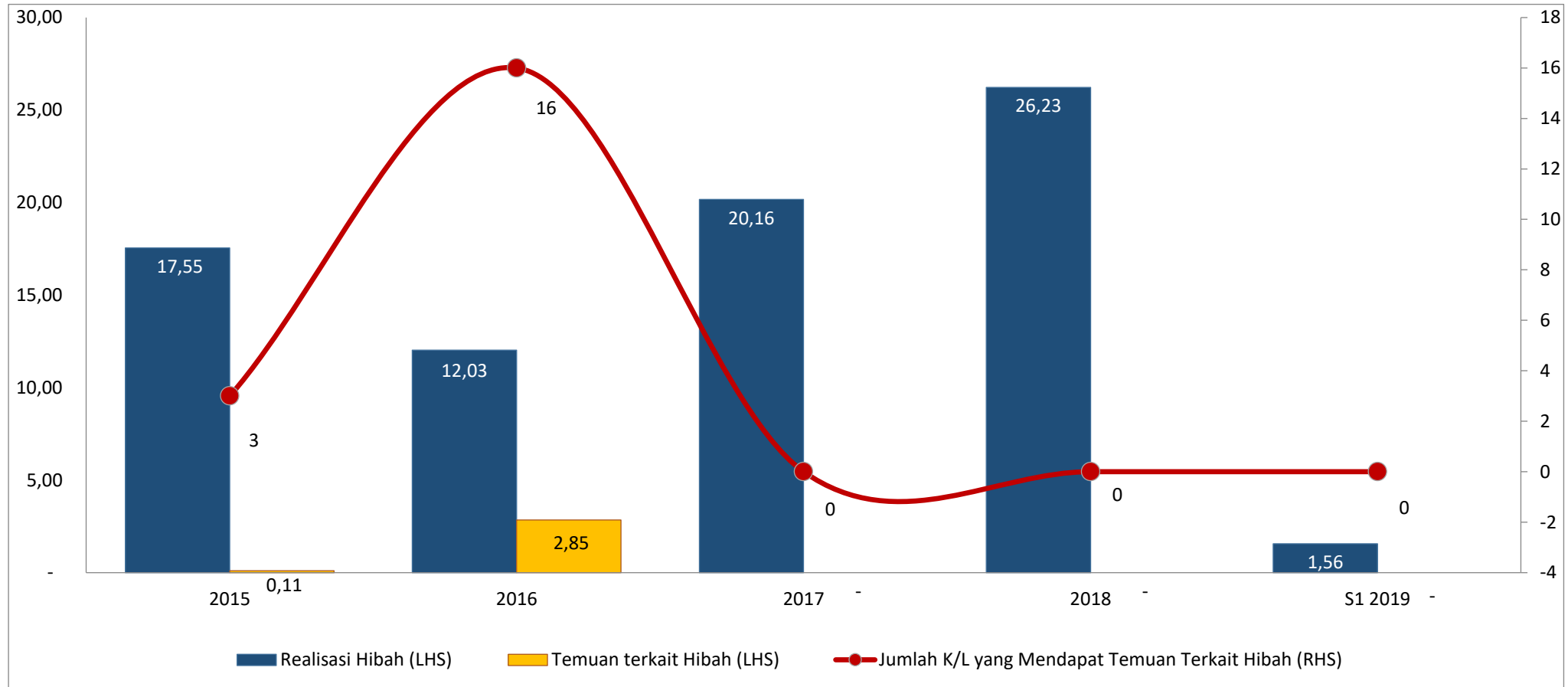
B. Sumber dari Rupiah Murni

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	Jumlah Pemda Penerima
1	Hibah Jalan Daerah	Membantu pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam manajemen pengelolaan jalan provinsi	Kementerian PUPR	10 Pemda
2	Air Minum Rupiah Murni (Nationwide Water Hibah Program)	Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	230 Pemda
3	Hibah Sanitasi/Air Limbah Rupiah Murni	Meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100 % akses prasarana air limbah yang layak. Mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pengelolaan lumpur tinja, melalui pembangunan tangki septik yang memenuhi persyaratan teknis dan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	71 Pemda

Sumber: LK BA 999.02 Semester I Tahun 2019

PERKEMBANGAN TEMUAN BPK TERKAIT HIBAH

(triliun rupiah)



Sumber: LKPP Kementerian Keuangan



Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan